

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian mengenai mekanisme pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2024, dapat disimpulkan bahwa:

1. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Pasal 30-32 mekanisme pengelolaan DBH-CHT telah mengikuti ketentuan yang berlaku, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, evaluasi, hingga pelaporan. Seluruh tahap berjalan sesuai pedoman teknis pemerintah pusat, sehingga prosesnya lebih terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan mekanisme tersebut, pengelolaan DBH-CHT di Kabupaten Bojonegoro dapat berjalan transparan dan terukur.
2. Pemanfaatan DBH-CHT di Kabupaten Bojonegoro telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024, yang memprioritaskan tiga bidang utama: Pada bidang kesejahteraan masyarakat, program seperti pelatihan petani tembakau, bantuan sarana pertanian, dan bantuan langsung tunai bagi buruh tani serta buruh pabrik rokok memberikan dampak nyata bagi peningkatan kapasitas dan pendapatan. Pada bidang kesehatan, DBH-CHT digunakan untuk

penyediaan sarana prasarana kesehatan dan layanan pemeriksaan kesehatan. Sementara itu, di bidang penegakan hukum, dana ini membantu memperkuat pengawasan peredaran rokok ilegal dan meningkatkan kesesuaian regulasi. Secara keseluruhan, pemanfaatan DBH-CHT pada ketiga bidang tersebut berkontribusi positif terhadap peningkatan kualitas layanan publik. Ditinjau dari teori keadilan bermartabat, pengelolaan DBH-CHT di Kabupaten Bojonegoro sudah mengikuti prosedur yang ditetapkan dan manfaatnya juga telah dirasakan oleh masyarakat melalui berbagai program yang dijalankan. Sehingga mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat disarankan sebagai berikut:

1. Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Bojonegoro telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah dilaksanakan dengan baik. Meski demikian, pemerintah daerah melalui OPD pelaksana diharapkan terus menjaga konsistensi pelaksanaannya serta diharapkan dapat mempertahankan capaian yang telah ada serta terus meningkatkan kinerja pengelolaan DBH-CHT agar pada setiap tahunnya tidak hanya memenuhi target, tetapi juga mampu melampaui target yang telah ditetapkan.
2. Pada bidang penegakan hukum, Pemerintah Daerah diharapkan dapat melakukan evaluasi secara lebih komprehensif terhadap efektivitas

pemanfaatan alokasi DBH-CHT sebesar 10% khususnya dalam hal sejauh mana program yang dilaksanakan telah berdampak langsung pada peningkatan kapasitas, profesionalitas, dan kinerja aparatur penegak ketertitaban. Evaluasi tersebut diperlukan agar pemanfaatan DBH-CHT tidak hanya bersifat administratif atau jangka pendek, tetapi dapat diarahkan pada program yang lebih tepat sasaran, berkelanjutan, dan selaras dengan tujuan keadilan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Andyanita Hanif Hermawati, Chalties Diah Pratiwi, dan M S Qurrotu A'yunin Lathifah. *Nikotin, Tembakau, Dan Rokok*. Penerbit Andi, 2023.
- Kristiawanto *Pengantar Mudah Memahami Metode Penelitian Hukum*. Nas Media Pustaka, 2024.
- Jonaedi Efendi, dan Prasetijo Rijadi. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Edisi Kedua*. Prenada Media, 2022.
- Agus Santoso *Hukum, Moral & Keadilan*. Prenada Media, 2015.
- Teguh Prasetyo. *Keadilan Bermartabat: Perspektif Teori Hukum*. Nusamedia, 2019.
- Rachmat, Muchjidin, dan Rizma Aldillah. "69 Agribisnis Tembakau Di Indonesia: Kontroversi Dan Prospek: Tobacco Agribusiness in Indonesia: Controversy and Prospects," n.d., 69–80.
- Sadat, A. *Tata Kelola Keuangan Pemerintahan*. Deepublish, 2022.
- Salmon, H C J, S A Wiraguna, J M Monteiro, H M Y Tita, N Susilawati, S Arsyanda, J J Koynja, dan H A Rahayu. *Pengantar Hukum Pajak Indonesia*. Penerbit Widina, 2025.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 Tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kota/Kabupaten Tahun Anggaran 2025
- Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Bojonegoro

Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Serta Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro,” n.d.

C. Jurnal

Abdillah Ahsan, Nur Hadi Wiyono, Retno Rusdijijati, Meita Veruswati, Nadira Amalia, Adela, Miranti Yuniar. *Evaluasi Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Dbhcht) Untuk Kesejahteraan Petani Tembakau*. UI Publishing, 2022.

Ade Pratiwi, Ifana, Siti Alvina Nuril Hidayah, dan Laili Nadiyah Nafis Violinita. “Efektifitas Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Dbh Cht) Dalam Mengatasi Dampak Pandemi Covid-19.” *Info Artha* 6, no. 1 (2022): 31–40. <https://doi.org/10.31092/jia.v6i1.1279>.

Alamanda, Asri Elies. “Tanaman, Peremajaan Sawit, Kelapa.” *Wajah Hukum* 7, no. April (2023): 73–83. <https://doi.org/10.33087/wjh.v7i1.1129>.

Dika, Yulinda, dan Rynalto Mukiwihando. “Analisis Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagi Penanganan Covid-19 Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun 2020.” *Simposium Nasional Perpajakan* 1, no. 1 (2021): 100–106.

D, Gunawan Hadi Pirwanto, dan Kholid Syaifudin Salam An. “Priyatno Dwidjaja, 2005, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Indonesia, Refika Aditama, Bandung, hal. 87 1” 5, no. 1 (2022): 15–31.

Novandra, D. R., & Herawati, N. R. “Analisis Implementasi Penyaluran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Dalam Bentuk Bantuan Langsung Tunai Di Kota Magelang Tahun 2022-2023.” *Journal of Politic and Government Studies* 13(4) (2024): 614-628.

Purwanto, Gunawan Hadi, Irma Mangar, dan Asri Elies Alamanda. “Implementasi dan Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Hak Pemulia Tanaman di Indonesia” 6 (2024): 376–93

Prayitno, Eko Edy. “Disparitas Implementasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBH-CHT) Terhadap Program Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat Daerah Disparities in the Implementation of Tobacco Excise Revenue Sharing Funds (DBH-CHT) on Regional Community Welfare Development.” *Jurnal Hukum Mimbar Justitia (HMJ)* 10, no. 1 (2024): 182–95.

Samuel, Samuel. “Peran Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Dalam Mencapai Tujuan Pengenaan Cukai.” *Jurnal BPPK: Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan* 15, no. 2 (2022): 01–15.

<https://doi.org/10.48108/jurnalbppk.v15i2.698>.

Sihombing, Yumi Ines, Danniela Boru, Ranismawati S. Laia, Maria Tribuana Tungga Dewi, Melva Andani Sarumaha, dan Juli Trianita Lumban Tobing. "Peran Cukai Hasil Tembakau Dalam Meningkatkan Penerimaan Negara: Kontribusi Penerimaan Cukai Dan Pajak." *HelFin Journal* 2, no. 1 (2025): 196–208. <https://doi.org/10.33541/helfin.v2i1.6371>.

Sri Novita, Endang, dan Zennis Helen. "Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Penegakan Hukum Di Bidang Cukai Hasil Tembakau." *Ekasakti Legal Science Journal* 1, no. 3 (2024): 265–76. <https://doi.org/10.60034/59hs2619>.

D. Website

Jatim, Detektif. "Penyaluran BLT DBHCHT Buruh Pabrik Tunggu SK Bupati Pamekasan, Buruh Tani Proses Verval," 2025. <https://detektifjatim.com/2025/09/penyaluran-blt-dbhcht-buruh-pabrik-tunggu-sk-bupati-pamekasan-buruh-tani-proses-verval/>.

Jatimnet.com. "Penyaluran Carut Marut, DPRD Lamongan Sebut Perbup Tentang Penyaluran BLT DBHCHT Longgar," 2023. <https://jatimnet.com/penyaluran-carut-marut-dprd-lamongan-sebut-perbup-tentang-penyalaran-blt-dbhcht-longgar>.

Radarsurabaya.id. "57 Persen Produksi Tembakau Nasional Berasal dari Jatim, Ini Daerah Penghasilnya," 2025. <https://radarsurabaya.jawapos.com/ekonomi/776061043/57-persen-produksi-tembakau-nasional-berasal-dari-jatim-ini-daerah-penghasilnya>.

Statistik, Badan Pusat. "Luas Tanaman Perkebunan Menurut Provinsi, 2024." (*BPS - Statistics Indonesia*), 2024.

E. Wawancara

Wawancara dengan Bapak Dani Fianto selaku Pejabat Fungsional Ahli Pertama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Bojonegoro, pada tanggal 03 November 2025

Wawancara dengan Ibu Fadillah S.Si selaku Staff Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Kabupaten Bojonegoro bagian Penata Kelola Pertambangan, pada tanggal 21 November 2025

Wawancara dengan Ibu Alfi Ayu Maghfiroh selaku Staff Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam bagian Petugas Survei Geologi, pada tanggal 21 November 2025